

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerjasama blok perdagangan negara-negara Asia Tenggara yang dikenal dengan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) akan segera diberlakukan. Debat publik dan perundingan mengenai kesiapan Indonesia dan negara ASEAN lain yang tertimpa krisis ekonomi, terkesan maju mundur. karena kondisi Indonesia belum siap mengalami perubahan yang begitu besar. Akan tetapi, tidak jarang semangat keterbukaan, tekanan akuntabilitas dan keniscayaan globalisasi yang memang sedang menjadi kecenderungan dan jargon wajib akhir-akhir ini cenderung tidak melakukan perubahan terhadap pemberlakuan AFTA itu. Paradigma atau falsafah yang mendukung semangat keterbukaan itu adalah bahwa perkembangan perekonomian dunia yang semakin pesat pada abad ke-20 yang lalu, merupakan salah satu pemicu semakin terbukanya hubungan satu negara dengan negara lainnya. Sehingga sedikit kemungkinan suatu negara terisolir dan tidak berhubungan dengan negara lainnya. Hal ini ditandai dengan semakin cepatnya aliran barang dan jasa antarnegara. Perundingan-perundingan perdagangan di beberapa kawasan sudah dilakukan untuk mempercepat aliran barang dan jasa antarnegara dengan mencanangkan perdagangan bebas di kawasan tersebut dengan cara menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan, baik hambatan tarif maupun bukan tarif. Adanya perdagangan bebas antarnegara diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan negara yang ikut serta dalam perdagangan bebas, dengan mengandalkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

Indonesia sebagai suatu negara terbuka mempunyai komitmen untuk ikut serta dalam perdagangan bebas di berbagai kawasan. Selain di kawasan ASEAN dengan AFTA, Indonesia juga menandatangani perjanjian perdagangan bebas Asia Pasifik, yang dikenal dengan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*). Di tingkat dunia, Indonesia juga ikut menandatangani perjanjian perdagangan bebas Uruguay Round (*Putaran Uruguay*) atau sekarang *World Trade Organization* (WTO/ Organisasi Perdagangan Dunia).

Berbeda dengan kesepakatan perdagangan yang terdapat pada APEC dan WTO yang mempunyai anggota lebih banyak (18 negara ditambah dengan tiga anggota baru pada APEC dan negara-negara di dunia pada WTO), keanggotaan AFTA adalah eksklusif untuk negara-negara ASEAN (enam negara ditambah empat anggota baru).

Kesepakatan AFTA juga bersifat *involuntary* dengan perjanjian yang mengikat, sehingga kesepakatan AFTA cenderung menjadi blok perdagangan (*trading block*) di antara negara-negara ASEAN. Dengan perjanjian AFTA, perdagangan bebas akan terjadi antarnegara ASEAN. Sehingga diharapkan aliran perdagangan antarnegara ASEAN semakin cepat dan secara teori lebih menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN.

Sebagai anggota ASEAN, Indonesia menyepakati perjanjian AFTA pada pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN bulan Januari 1992 di Singapura. Pada perundingan tersebut, disetujui pencapaian perdagangan bebas 15 tahun setelah 1 Januari 1993 atau pada tahun 2008. Pada permulaan perundingan, disetujui 15 grup komoditas yang akan diliberalisasi dengan cepat (*fast track*).

Skema kesepakatan tarif untuk komoditas tertentu ini disebut sebagai skema kesepakatan tarif efektif atau *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*. Pada kesepakatan tarif ini, produk pertanian yang belum diproses tidak termasuk ke dalam perdagangan bebas.

Pada pertemuan ASEAN Desember 1995, Indonesia mengharapkan dimasukkannya 15 komoditas yang penting bagi dan menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia, seperti beras, gula, terigu, bawang putih, kedele, dan cengkeh dari *Temporary Exclusion List* ke dalam *Sensitive List*. Ide itu sempat menjadi bahan tertawaan (*laughing stock*) negara-negara lain, terutama karena Indonesia bukan produsen gandum (terigu).

Di samping itu, beberapa komoditas di atas termasuk rangkaian komoditas yang berada dalam sistem tata niaga yang dijalankan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Usul Indonesia tersebut memang sempat didukung oleh Filipina, walaupun akhirnya Thailand dan sebagian besar negara-negara ASEAN lain tidak menyetujuinya.

Akhirnya, berdasarkan kesepakatan di antara negara-negara ASEAN itu diputuskan bahwa produk pertanian yang belum diproses (*unprocessed product*) tetap diturunkan tarifnya sampai lima persen saja pada tahun 2003, untuk seterusnya diturunkan tarifnya hingga 0 persen pada tahun 2010. Khusus untuk Indonesia dan Filipina terdapat fleksibilitas untuk tetap menerapkan tarif di atas 5 persen setelah tahun 2010 pada komoditas beras dan gula, dan membuat kriteria pengamanan bagi produsen domestik. Kesepakatan ini merupakan jalan tengah dan tentu saja tidak mengakomodir semua tuntutan Indonesia.

Di samping perubahan yang diinginkan Indonesia dan Filipina, Malaysia juga menginginkan perubahan dalam mengimplementasikan penurunan tarif di sektor otomotif. Malaysia menginginkan penurunan tarif yang dimulai pada tahun 2000 untuk otomotif ditunda dan liberalisasi perdagangan otomotif pada tahun 2003 tidak dilaksanakan.

Sampai saat ini usulan tersebut belum dapat diakomodir. Penolakan penurunan tarif pada komoditas tertentu di Indonesia, Filipina dan Malaysia menunjukkan bahwa keunggulan komparatif dan kompetitif antarnegara ASEAN berbeda satu sama lain. Untuk negara dengan penduduk yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan tergantung pada sektor pertanian, baik untuk konsumsi maupun produksi seperti Indonesia, mengharapkan pengecualian untuk komoditas yang menjadi andalan ekspor atau komoditas impor yang sensitif terhadap kepentingan rakyat banyak. Demikian halnya dengan Malaysia yang juga melindungi 'industri bayinya' dari serbuan produk otomotif yang berasal dari luar negeri.

Di sinilah negara-negara ASEAN justru cenderung saling bersaing sendiri di pasar internasional, sehingga diperlukan kesepakatan bersama antara negara-negara ASEAN pada produk yang sama untuk memperkuat nilai rebut tawar (*bargaining position*) di pasar internasional.

Hal yang perlu diperhatikan adalah perancangan suatu sistem insentif ekonomi dan aransemen kelembagaan dalam perdagangan internasional yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangannya. Kecilnya pangsa pasar perdagangan internasional negara-negara ASEAN oleh Indonesia dapat menjadi indikator bahwa

implementasi AFTA memberikan dampak positif yang tidak begitu besar bagi Indonesia. Dalam sebuah analisis dengan model keseimbangan umum (*Computable General Equilibrium=CGE*) dengan mengikutsertakan mobilitas modal dari luar.

Hasilnya menunjukkan bahwa dampak blok perdagangan AFTA terhadap kesejahteraan warga negara juga lebih kecil dibandingkan dengan perdagangan bebas di kawasan yang lebih luas seperti APEC.

AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN FreeTrade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema *Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos,

Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015 (Redaksi Setjen Departemen Pertanian dalam Sekilas Tentang AFTA hlm 02). Bagi negara-negara ASEAN, implementasi dari AFTA adalah lebih tepat apabila difokuskan untuk mengakselerasi kesepakatan perdagangan bebas pada kawasan yang lebih luas.

Perdagangan bebas yang disepakati negara-negara ASEAN dalam AFTA yang mengarah pada blok perdagangan, tidak terlalu memberikan dampak positif bagi Indonesia. Dalam sisa waktu kurang dari dua tahun ini, diplomasi dan perundingan dalam implementasi AFTA lebih tepat jika diarahkan untuk mempercepat kesiapan seluruh negara ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas di kawasan yang lebih luas.

Artinya bahwa, Indonesia diharapkan mampu berinteraksi dan berkompetisi dengan baik dalam pasar bebas tersebut. Indonesia dapat memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta pelaku pasar bebas ini dan didorong dengan sistem teknologi informasi yang baik. Maka, Indonesia perlu membenahi diri untuk menghadapi AFTA. Selain itu, sebagai salah satu dari penggagas AFTA, maka Indonesia diharapkan mampu dalam menghadapi AFTA. Meskipun jika dilihat dari kondisi perekonomian saat ini, jelas amat berat bagi Indonesia sendiri untuk menghadapi AFTA.

Secara umum, situasi ekonomi Indonesia sangat sulit. Perdagangan Indonesia dalam kurun 2014-2018 melemah, baik dalam kegiatan ekspor dan tidak di ikuti dengan impor. Kondisi ekonomi makro ditambah stabilitas politik yang tidak stabil serta penegakan hukum dan keamanan yang buruk ikut mempengaruhi daya saing dalam perdagangan dunia. Dalam AFTA terutama dalam bidang perdagangan hortukultura, peran negara dalam perdagangan sebenarnya akan

direduksi secara signifikan. Sebab, mekanisme tarif yang merupakan wewenang negara dipangkas. Karena itu, diperlukan perubahan paradigma yang sangat signifikan, yakni dari kegiatan perdagangan yang mengandalkan proteksi negara menjadi kemampuan perusahaan untuk bersaing. Tidak saja secara nasional atau regional dalam AFTA, namun juga secara global. Karena itu, kekuatan manajemen, efisiensi, kemampuan permodalan, dan keunggulan produk menjadi salah satu kunci keberhasilan (Aditya, 2007 hlm 34)

Apabila membaca kondisi perekonomian Indonesia tersebut, maka sedikit pesimis bisa bersaing di kancah ASEAN. Perekonomian masih didorong oleh sektor konsumsi (*consumption driven of economy*), terbukti dengan pangsa pada PDB sekitar 65 persen. Sementara komponen pendorong pertumbuhan ekonomi lain salah satunya Investasi hanya menyumbang sekitar 20 persen. Pangsa konsumsi pada pertumbuhan ekonomi tergolong terlalu besar, meski itu tetap berdampak baik perekonomian dalam jangka pendek. Sementara pangsa investasi, khususnya yang fisik berperan terlalu sedikit dan tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Dengan kondisi perekonomian di atas, nampaknya pemerintah diharapkan bekerja lebih keras daripada biasanya, bila tidak ingin tertinggal. Hal tersebut diharapkan dapat dilakukan karena perekonomian Indonesia saat ini masih jauh tertinggal dibanding negara ASEAN lainnya (Kurniawan, 2015 hlm 75).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengajukan judul skripsi:

“PENGARUH ASEAN FREE TRADE AREA TERHADAP PERDAGANGAN KOMODITAS HORTIKULTURA INDONESIA DI PASAR BEBAS ASIA TENGGARA”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan sejumlah pertanyaan sebagai usaha menginventarisir masalah yang harus dicari jawabannya berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh AFTA terhadap perdagangan komoditas hortikultura di Indonesia?
2. Bagaimana peningkatan perdagangan komoditas hortikultura Indonesia di pasar bebas asia tenggara?
3. Bagaimana implementasi strategi AFTA terhadap perdagangan komoditas hortikultura indonesia di pasar bebas asia tenggara?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melebar kemana-mana, penulis membatasi permasalahan tersebut pada Pengaruh ASEAN Free Trade Area dalam meningkatkan perdagangan hortikultura indonesia pada tahun 2014-2018

Sebelum pemberlakuan AFTA peningkatan perdagangan hortikultura indonesia yaitu menggunakan konsep CEPT (*Common Effective Preferential Tariff Scheme*) pada tahun 2008-2012

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi strategi AFTA dalam meningkatkan intensitas perdagangan hortikultura Indonesia di pasar Bebas Asia Tenggara?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Dalam meneliti sebuah permasalahan, tentunya harus ada tujuan. Karena tujuan merupakan arah atau sasaran yang akan dicapai. Berikut tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh AFTA terhadap perdagangan komoditas Hortikultura di Indonesia
2. Untuk mengetahui peningkatan komoditas hortikultura Indonesia di pasar bebas asia tenggara
3. Untuk mengetahui implementasi strategi AFTA terhadap perdagangan komoditas hortikultura indonesia di pasar bebas asia tenggara

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Menambah pengetahuan mengenai pengaruh dari Asean Free Trade Area
2. Menambah pengetahuan mengenai perekonomian Indonesia
3. Menambah pengetahuan mengenai pengaruh dari adanya ASEAN Free Trade Area terhadap posisi Indonesia di Arena pasar bebas Asia Tenggara

4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional Strata 1 (Strata-1) pada jurusan Hubungan Internasional Tahun akademik 2018/2019.
5. Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah kepustakaan bagi Perpustakaan Fisip HI UNPAS mengenai pengaruh ASEAN Free Trade Area terhadap perdagangan hortikultura Indonesia
6. Memberikan gambaran kepada pihak lain yang akan meneliti tentang permasalahan yang sama.

